

EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Yunika Sari

Syunika70@gmail.com

Pembimbing : Zaili Rusli SD

Jurusan Ilmu Administrasi – Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Development is one of the most important aspects in a country. Development here is not only physical such as office buildings or physical infrastructure. But the intended development is various aspects of life, such as physical development, social development, economic development and many other developments. Likewise for city development which has not much different definitions for national development in general. In the development of settlement construction, precisely in the city of Pekanbaru, so far there have been many complicated problems. The purpose of this study was to determine the effectiveness of supervision of settlement development in Pekanbaru city and to find out the factors that influence the effectiveness of supervision of settlement development in Pekanbaru City. The theory used in this study is the effectiveness of supervision, settlement construction, spatial concepts. After conducting research, it was found that the effectiveness indicators of the supervision of settlement construction in Pekanbaru City were input, process, output, outcome. The factors that influence the effectiveness of supervision of settlement development in Pekanbaru are human resources and infrastructure inadequate as well as limitations and budget. The conclusion of the effectiveness of development supervision is that supervision by the office of spatial planning and building in carrying out its duties and functions is still not fully implemented, because there still need to be some improvements that must be considered.

Keywords : *Effectiveness of Settlement Supervision and Development*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kemajuan suatu negara. Pembangunan disini bukan hanya secara fisik seperti gedung-gedung perkantoran ataupun sarana prasarana fisik saja. Tetapi pembangunan yang dimaksudkan adalah dari berbagai aspek kehidupan, seperti pembangunan fisik, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan

masih banyak pembangunan yang lainnya. Demikian pula untuk pembangunan kota yang memiliki definisi yang tak jauh berbeda untuk pembangunan bangsa pada umumnya. Pendirian bangunan merupakan proses pembentukan “wajah kota” dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, pengawasannya sangat dibutuhkan untuk mencapai tata ruang dan kota yang diinginkan dimasa depan. Usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, guna terwujudnya

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh pemerintah dilaksanakan serangkaian kegiatan pembangunan nasional secara bertahap dan berencana di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual, sebagaimana ditegaskan dalam Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 antara lain, Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia.

Pembangunan tersebut telah disusun dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) baik dalam daam master plan maupun detail dan teknis tata ruang yang dijadikan sebagai pedoman atau kerangka acuan dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan kota. Untuk mengatur jalannya pembangunan khususnya pembangunan fisik, pemerintah perlu menetapkan peraturan-peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan pembangunan guna tercipta kondisi yang dinamis. Pemerintah kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2000 tentang izin bangunan dalam daerah kota Pekanbaru. Peraturan daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan daerah yang sebelumnya yakni peraturan daerah No. 13 Tahun 1993. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2000 ini memuat tentang izin bangunan dalam daerah Kota Pekanbaru yakni :

Pasal 3 ayat (1):

“Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, dan membongkar serta menggunakan bangunan, dalam wilayah

Kota Pekanbaru harus memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk”.

Dalam hal ini pejabat yang ditunjuk untuk mengurusnya yakni Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Setiap dinas atau kantor merupakan pusat dari segala kegiatan bagi suatu organisasi, maka kantor harus dapat menunjukkan kesan yang baik terhadap relasi/tamu yang mengunjunginya dan dapat meningkatkan kinerja, sedangkan guna kantor/dinas adalah untuk memberikan pelayanan komunikasi warga masyarakat. Mengadakan komunikasi berarti memberi dan menerima keterangan, dengan demikian fungsi-fungsi pokok sebuah dinas adalah menerima, mencatat, menyusun dan memberi keterangan.

Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru merupakan salah satu kantor/instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat mengenai masalah pengurusan permohonan izin mendirikan, merubah, merobohkan bangunan (IMB). Selain itu melakukan penataan Kota Pekanbaru yang indah, tertib, aman, dan nyaman. Dinas Tata Ruang dan Bangunan memiliki tanggung jawab untuk menata dan mengendalikan setiap bangunan yang ada diantara masyarakat, baik itu bangunan masyarakat maupun bangunan pemerintah.

Saat ini pembangunan di Kota Pekanbaru semakin pesat, hal ini terlihat pada banyaknya pembangunan ruko, toko, perumahan, perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Dengan melihat hal diatas, apakah masyarakat atau warga yang mendirikan sebagai pemilik bangunan tersebut mempunyai mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), karena kita ketahui bahwa di Kota Pekanbaru sudah ada Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota yang mengatur mengenai perizinan

pendirian bangunan yakni Peraturan Daerah No.14 Tahun 2000. Di dalam peraturan ini dijelaskan bahwa setiap pendirian bangunan harus mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) terlebih dahulu. Permohonan izin tersebut diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, proses pembuatan permohonan pembuatan izin dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, kemudian permohonan izin tersebut akan ditangguhkan penyelesaiannya jika pemohon tidak melengkapi dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam jangka waktu yang ditetapkan, penangguhan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan, kemudian izin mendirikan bangunan (IMB) akan batal apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan izin pelaksanaan belum dimulai pembangunannya atau pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak diteruskan dan dianggap hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan tertulis dari pemegang izin.

Dengan mengawasi dan memantau kegiatan pembangunan yang tidak memiliki izin pembangunan beberapa kawasan permukiman yaitu perumahan, perdagangan jasa, dan pergudangan yang memiliki izin mendirikan bangunan. pembangunan ruko, toko, perumahan, perkantoran, sekolah dan lain-lain ini tidak jarang aturan yang telah dibuat bahkan tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Dengan kata lain, saat ini ada kesan pembangunan ruko dan gedung-gedung lainnya itu merusak wajah Kota Pekanbaru karena didirikan terkecuali sekehendak hati. Sedangkan dalam Peraturan Daerah sudah dijelaskan tentang tertib pembangunan dan

juga bangunan bahwa dalam membangun bangunan adanya ketentuan antara lain Garis Sempadan Bangunan (GSB) dalam rencana kota tidak boleh dilanggar dalam mendirikan atau memperbaharui seluruhnya atau sebagian dari bangunan, bangunan tertentu berdasarkan letak, bentuk, ketinggian dan penggunaannya harus dilengkapi peralatan yang berfungsi sebagai pengamanan terhadap lalu lintas udara atau lalu lintas sungai.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Pengawasan Pembangunan Permukiman di Kota Pekanbaru?
2. Apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Pembangunan Permukiman di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Pembangunan Permukiman di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Pembangunan Permukiman di Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi terhadap efektivitas pengawasan pembangunan Di Kota Pekanbaru.
2. Sebagai wahana bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat pada mata kuliah jurusan administrasi negara.

3. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai sumber informasi bagi pembaca.
4. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi kepentingan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

2. KONSEP TEORI

2.1 Efektivitas

Menurut **Jones dalam Mitra (2010:30)** dalam mencapai sebuah pengawasan yang efektif terdiri dari 3 tahap:

1. Input

Tahap input meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Dalam tahap input, tingkat efisien sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimilikinya.

2. Proses

Tahap conversion ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap ini keahlian sumber daya manusia dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan serta menentukan tingkat produktivitasnya.

3. Output

Sedangkan dalam tahap output dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap output pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia. Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi secara umum ada pandangan bahwa efektivitas dimaksudkan atau didefinisikan dalam batas-batas tingkat pencapaian tujuan. Dengan demikian diartikan

bahwa sejauh mana tujuan yang ditetapkan dapat merealisasikannya dalam pencapaian hasil.

2.2 Pengawasan

Dalam hal ini pengawasan itu dimulai pada saat pendataan mulai dilakukan maka sejak saat itulah pengawasan berlangsung. Karna dalam pengawasan ini ada :

- a. Konsultan pengawasan.
- b. Konsultan perencanaan.
- c. Pengawasan internal dinas sendiri oleh bidang perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut **Brantas (2009:195)** adapun langkah langkah proses pengawasan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.
- b. mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
- c. melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Menurut **Winardi** “pengawasan adalah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Menurut **Winardi (2000:161)** terdapat faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan, yaitu sasaran-sasaran individual dan organisatoris biasanya berbeda (maka demikian diperlukan adanya pengawasan

untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja kearah sasaran-sasaran organisasi). Pengawasan diperlukan karena terdapat adanya suatu keterlambatan antara waktu sasaran dan sewaktu merealisasikan sasaran kerjanya.

M.Manullang (2008:57) mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Adapun langkah- langkah pengawasan menurut **Herujito (2004:96)** adalah :

- a. Menetapkan standar pelaksanaan dan metode
- b. Mengukur prestasi kerja
- c. Membandingkan standar dengan hasil atau pelaksanaan kegiatan
- d. Mengambil kegiatan koreksi

Dari pengertian pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya sangat diperlukan seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan sudah terlaksana atau terealisasikan atau belum efektif terlaksana.

Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut **Situmorang dan Juhir (1994:22)** maksud pengawasan adalah untuk :

1. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang buat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
2. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah benar atau tidak.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam – rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah

ditentukan dalam perencanaan atau tidak.

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang tidak ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Dapat disimpulkan pula maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik.

Arti penting dari pengawasan Menurut **Hasibuan (2006:242)** sebagai proses untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan suatu kegiatan yang memiliki tujuan antara lain :

1. Supaya proses pelaksanaan yang dilakukan oleh organisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan perencanaan.
2. Sebagai upaya untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan(*corrective*) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana yang direncanakan.

Pengendalian bukan hanya untuk mencari kealahan, tetapi berusaha untuk menghindar terjadinya kesalahan-kesalahan sehingga pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses yakni hasil akhir diketahui.

Menurut **Koontz, et. al**, pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahan tinggi.

1. Pengawasan Preventif dan Represif

a. Pengawasan Preventif

Dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. Pengawasan Represif

Dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditentukan. Pengawasan represif terhadap alih fungsi bangunan dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru dalam hal ini adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan subjeknya dapat dibagi jadi empat macam pengawasan, yakni :

1) **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai rencana dan peraturan yang berlaku. Pengawasan fungsional ini dilakukan oleh Badan Pengawas seperti BPK, Inspektorat Jenderal, BPKP, Bawasda provinsi/Kabupaten/Kota.

2) **Pengawasan masyarakat** yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan dan tulisan, kepada aparat pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun media.

3) **Pengawasan Legislatif** adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

4) **Pengawasan melekat** adalah pengawasan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif maupun represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien

sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Keputusan Menteri Pan No.Kep/46/M.PAN/2004).

Senada dengan pendapat **Situmorang dan Juhir, Siagian (2003:139-140)** mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu :

1. **Pengawasan Langsung (*direct control*)** ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:
(a) inspeksi langsung
(b) on the spot observation
(c) on the spot report yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula jika diperlukan.

Akan tetapi karena banyaknya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak dapat mungkin selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

2. **Pengawasan Tidak Langsung (*indirect control*)** ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk :
(a) tertulis
(b) lisan.

Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja.

Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

2.3 Pembangunan Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU No.4 Tahun 1992). Permukiman yang diartikan sebagai perumahan atau kumpulan tempat tinggal dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitan dan yang ada di dalam permukiman. Kalau kita menyebut perumahan harus diartikan sebagai wadah fisiknya, sedangkan permukiman harus kita bayangkan sebagai paduan antara wadah dengan isinya, yaitu manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sedangkan prasarana lingkungan hidup adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana dapat diartikan sebagai infrastruktur.

a. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Mewujudkan fungsi lingkungan hunian dan tempat kegiatan dapat didukung hasil wawancara adalah sebagai berikut, melalui

- a. Perencanaan
- b. Pembangunan
- c. Pemanfaatan
- d. Pengendalian

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yang tertuju pada teori yang bersangkutan dengan permasalahan.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami dan berpengalaman lebih mengenai objek penelitian pelaksanaan pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Informan penelitian dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dengan metode pengambilan

sampel menggunakan metode sampling dan metode snowball sampling pada informan masyarakat.

Adapun key informan pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Bagian Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan.
2. Kepala Seksi Pada Bagian Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan.
3. Staf/Pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.
4. Masyarakat.

3.3 Jenis Data

a. Data Primer

yaitu data yang diperoleh dari informasi mengenai Efektivitas Pengawasan Pembangunan Permukiman Di Kota Pekanbaru terhadap pendirian bangunan di Kota Pekanbaru. Data-data tersebut dapat didukung hasil wawancara adalah sebagai berikut, melalui kuisisioner serta angket.

b. Data Sekunder

yaitu data dan informasi serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati langsung pada objek penelitian dan mencatat beberapa hal-hal penting yang berhubungan dengan pengawasan guna mendapatkan informasi yang ada dalam penelitian. Observasi ini dilakukan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung dengan informan dan melakukan tanya jawab secara mendalam (indepth interview) dengan informan yang terkait langsung dan mengetahui serta memahami objek penelitian. Teknik wawancara dilakukan

terhadap semua responden yang dijadikan populasi dalam penelitian ini. Bertujuan untuk mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian meliputi Efektivitas Pengawasan Pembangunan Permukiman Di Kota Pekanbaru.

b. Dokumentasi

Menurut Ariukunto dalam Pasolong (2012:251) dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumentasi tidak kalah pentingnya metode pengumpulan data yang lain, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

3.5 Analisa Data

Teknik analisa yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penulis melakukan analisis terhadap data dan informasi yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar yang dikumpulkan secara menyeluruh. Analisis kualitatif ini dicari hubungan antara penelitian terhadap objek pengawasan, dan melakukan tindakan koreksi atau perbaikan atau sanksi terhadap pelanggaran ketentuan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas pengawasan Pembangunan dan Permukiman Kota Pekanbaru

4.1.1 Input

Input merupakan bagian yang terpenting dalam melakukan sesuatu untuk mencapai efektivitas berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dan berpengaruh pada hasil akhir. Dengan adanya perencanaan dalam melakukan pengawasan untuk mencapai terwujudnya suatu tujuan dalam sebuah lembaga/dinas tertentu. Untuk melihat efektivitas pengawasan pembangunan permukiman pada bagian input peneliti indikator sebagai acuan dalam memberikan pertanyaan kepada informan

yang diwawancarai, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Untuk melakukan pengawasan, suatu organisasi harus mempunyai standar operasional prosedur (SOP). Karena SOP merupakan salah satu alat yang biasa digunakan oleh suatu instansi untuk dijadikan standar pengukuran. Pengawasan yang efektif terjadi apabila standar pelaksanaan tersusun dengan jelas.

4.1.2 Proses

Proses merupakan bagian yang harus diterapkan sebagai tindak lanjut dari input. Dalam proses tentunya harus mengikuti rencana awal yang telah ditetapkan. Sehingga dengan kematangan input yang telah dilakukan akan memberikan pelaksanaan yang baik.

Untuk melihat efektivitas pengawasan pembangunan permukiman di kota pekanbaru pada indikator proses, peneliti membuat 3 sub bagian yang dijadikan sebagai indikator sebagai acuan yaitu:

a. Tahap Sosialisasi

Sosialisasi adalah bagian yang memuat suatu sistem penyampaian kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Proses sosialisasi ini merupakan tahapan untuk memberikan informasi tentang pelayanan yang akan diberikan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pemeberian pelayanan perkarwaan yang mudah karena dalam pengawasan direspon oleh masyarakat itu sendiri.

Tahap pelaksanaan efektivitas pengawasan pembangunan permukiman juga dapat dilakukan oleh pemberitaan di media massa seperti koran. Pengawasan oleh media massa cukup efektivitas karena media massa dibaca oleh masyarakat akan segera mengetahui jika terjadi suatu permasalahan

disekitar mereka. Melalui pemberitaan masyarakat juga dapat dihimbau untuk berpartisipasi melaksanakan pengawasan secara intensif.

c. Tahap Monitoring

Monitoring adalah suatu aktifitas yang dilakukan untuk melihat kesiapan pegawai di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Pelaksanaan monitoring ini harus dilakukan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan kepada setiap pegawai. Monitoring seharusnya dilakukan dalam jangka waktu tertentu agar pengawasan pembangunan selalu dalam keadaan layak dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

4.1.3 OutPut

Hasil (output) merupakan bentuk dari input kemudian diolah menjadi data sehingga memiliki berbagai macam bentuk outputnya. Hasil berupa mutu atau kualitas dalam bentuk kepuasan yang diterima oleh informan sebagai bagian dari pelayanan melalui jasa yang diberikan kepada masyarakat. Untuk melihat efektivitas pengawasan pembangunan pada bagian indikator output peneliti sebagai berikut:

a. Efektivitas Proses Kinerja Pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan efektivitas proses kerja yang dihasilkan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan masih belum efektif, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya input dalam organisasi seperti sumber daya manusia yang belum mencukupi, kualitas sumber daya manusia yang masih belum menguasai secara teknis hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan sumber daya manusia pegawai dan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas yang tidak tuntas dan masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat tentang kinerja pegawai yang kurang maksimal.

Suatu organisasi dilakukam berhasil/efektif dalam melaksanakan tugasnya apabila telah berhasil mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan terukur dan terarah serta terkoordinir kegiatannya dan menggunakan anggaran atau dana yang secukupnya tanpa harus melebihi dari yang sudah ditetapkan.

4.1.4 OutCome

OutCome adalah hubungan timbal balik sebagai suatu keterlibatan antara masyarakat dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Outcome ini dapat dilihat dari seberapa hubungan antara masyarakat dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Untuk melihat efektivitas pengawasan pada bagian indikator outcome meneliti mengajukan pertanyaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan Dinas Tata Ruang dan Bangunan.

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Pembangunan Permukiman di Kota Pekanbaru

4.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan izin mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru, hal ini bisa dilihat dari kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, sistem, proses dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini perugas atau sumber daya manusia dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup agar dapat melaksanakan pekerjaan dan sebagai modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Faktor terpenting dalam melaksanakan pengawasan adalah adanya sumber daya manusia. Untuk kelancaran suatu pengawasan yang dibutuhkan manusia yang produktif, serta kemampuannya yang handal sebagai pengelola yang profesional. Tetapi

dalam Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sumber daya manusianya masih minim. jumlah dari petugas pengawasan juga menentukan dalam keberhasilan dan maksimalnya pengawasan yang dilakukan. Tentu solusi yang harus ditempuh agar tercapai tujuan yang diharapkan, sebaiknya jumlah pengawas harus ditambah/membentuk tim pengawas khusus dan ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya, apakah melalui pelatihan/pendidikan, pengalaman dan sebagainya.

Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman sumber daya manusia yang diperlukan, namun kemampuan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, sumber daya manusia modal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

Melihat jumlah pegawai yang cuma sedikit ditambah belum dibentuknya tim pengawas dapat dikatakan pengawasan yang dilakukan kurang optimal, hal ini tidak sebanding dengan jumlah bangunan yang terus berkembang. Penulis mengajukan pertanyaan kepada Kepala Bagian Pengawasan Pembangunan Permukiman.

4.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan pengawasan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Ketidaktersediaan sarana transportasi dan lainnya tentu mengakibatkan pegawai Dinas mengalami kesulitan dalam melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap izin mendirikan bangunan kepada masyarakat.

Karena pembangunan permukiman yang diawasi cukup luas, hal ini berarti setiap melakukan pengawasan pembangunan permukiman dengan penambahan personil dan penambahan kendaraan operasional. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru termasuk salah satu dinas yang memiliki tugas penting di kota yang sedang berkembang ini. Seharusnya fasilitas transportasi yang ada dapat mencukupi kebutuhan dinas tersebut.

Fasilitas yang telah tersedia diharapkan oleh pihak pengelola dapat mencukupi.

Penyediaan sarana transportasi bagi petugas untuk melakukan pengawasan juga berkaitan dengan tingkat kepuasan yang seharusnya didapatkan diperhatikan. Hal ini karena wilayah yang harus diawasi cukup luas. Hal ini berarti setiap melakukan pengawasan pembangunan permukiman dibutuhkan pegawai dan alat transportasi yang cukup.

Oleh karena itu banyak faktor yang harus diupayakan untuk ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan penambahan personil dan penambahan kendaraan operasional. Selain itu fasilitas yang telah tersedia ternyata belum mencukupi kebutuhan untuk melakukan tugas dilapangan. Selain itu faktor informasi mengenai prosedur serta sosialisasi tentang syarat-syarat pendirian pembangunan permukiman belum terlaksanakan dengan baik. Informasi yang jelas dan aktual dapat menjawab setiap keluhan dan rasa tidak puas yang muncul dari masyarakat. Sebaliknya keluhan-keluhan dan informasi dari masyarakat dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pengelola Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru untuk usaha-usaha perbaikan di masa yang akan datang.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Efektivitas Pengawasan Pembangunan Permukiman di Kota Pekanbaru, serta faktor-faktor Efektivitas Pengawasan Pembangunan Permukiman di Kota Pekanbaru maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian sebagai berikut :

1. Efektivitas pengawasan pembangunan permukiman di kota pekanbaru oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih belum berjalan sepenuhnya, karna masih perlu adanya beberapa perbaikan yang harus

diperhatikan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dan data sekunder dengan masing-masing sub indikator dan kemudian data yang bersumber dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tentang “Efektivitas Pengawasan Pembangunan Permukiman Kota Pekanbaru” berada pada kategori kurang efektif.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru pengawasan dari dinas kurang efektif, terkadang membuat masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Rendahnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap pembangunan permukiman di kota pekanbaru agar tindakan pengawasan terhadap pembangunan permukiman oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditinjau kembali jumlah petugas serta fasilitas kendaraan yang ada agar dapat mendukung kerja dinas ini.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka kiranya penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru harus selalu meningkatkan pengawasan yang melekat kepada bawahannya dan dalam pemberian sanksi kepada pegawai yang selalu melakukan pelanggaran harus di berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dapat dicapai jika bangunan dapat diawasi dengan baik. Dalam meningkatkan pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru harus selalu memberikan pelatihan kerja bagi para pegawai . Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya

pemberian seminar dan pelatihan akan meningkatkan dan menambah pengetahuan dan kemampuan yang lebih sehingga tercipta pengawasan yang lebih efektif lagi.

2. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru harus selalu meningkatkan pengawasan yang melekat kepada bawahannya dan dalam pemberian sanksi kepada pegawai yang selalu melakukan pelanggaran harus di berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dapat dicapai jika bangunan dapat diawasi dengan baik. Para pegawai hendaknya selalu meningkatkan derajat efektivitasnya yaitu selalu meningkatkan pengawasan terhadap semua pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pengawasan izin mendirikan bangunan yang efektif. Agar tindakan pengawasan terhadap bangunan permukiman oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditinjau kembali jumlah petugas serta fasilitas kendaraan yang ada agar dapat mendukung kinerja dinas ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat, 2006. *Teori Efektivitas*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Bohari,1992.*Tahapan Proses Pengawasan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Brantas,2009.*Fungsi Pengawasan*. Jakarta : Grasindo.
- Hasibuan,2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Grasindo.
- Herujito,2004. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koontz,et.al.2015.*Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi,2013. *Teori Efektivitas*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- Pasalong, 2007. *Teori Efektivitas*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Sarwoto, 2010. *Tahapan Proses Pengawasan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Siagian, 2000. *Pengertian Pembangun*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswandi. 2009. *Tujuan Pengawasan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukanto. 2008. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sofyan Syafri. 2000. *Teknik Pengawasan*. Jakarta : PT. Pustaka Quantum.
- Situmorang, Juhir. 1994. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Situmorang dan Juhir, Siagian. 2003. *Proses Pengawasan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Steers, Sutrisno. 2010. *Teori Efektivitas*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Syafiie, 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : penerbit Andi.
- Sukanto, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Grasindo.
- Siswanto. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta Selatan: PT. Grasindo.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wirman Syafri. 2012. *Teori Efektivitas*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Peraturan Perundang-undangan, Jurnal dan Media Lainnya

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan dalam Daerah Kota Pekanbaru.
- Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 141 Tahun Tentang Uraian Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.